

IKUT RAYAKAN HUT KE-79 KR
Danone Kunjungi KR Klaten



KR-Sri Warsiti

Tim dari Danone saat di kantor Biro/Perwakilan KR Klaten.

KLATEN (KR) - Perwakilan dari PT Danone Indonesia mengunjungi Kantor Kedaulatan Rakyat (KR) Biro/Perwakilan Klaten-Surakarta. Selain untuk menjalin silaturahmi, mereka secara khusus mengucapkan selamat dan ikut merayakan Ulang Tahun ke-79 Kedaulatan Rakyat pada 27 September 2024.

Tim Danone Indonesia terdiri Rony Rusdiansyah (External Communication Manager Regional Indonesia Timur Danone Indonesia), Sares Namara (GESA Manajer), Rama Zakaria (Stakeholder Relation Manager Pabrik Aqua Klaten), beserta staf Yuli Dwi Hastuti. Rombongan diterima Kepala Biro/Perwakilan Kedaulatan Rakyat, Sri Warsiti dan jajaran.

External Communication Manager Regional Indonesia Timur Danone Indonesia, Rony Rusdiansyah mengemukakan, kunjungannya bersama tim untuk ikut serta merayakan ulang tahun Kedaulatan Rakyat, sebagai koran tertua di Indonesia yang kini tetap eksis, memasuki usia hingga 79 tahun.

Rony berharap Danone dalam hal ini Aqua dan Sarihusada bisa terus menjalin kerjasama dengan Kedaulatan Rakyat, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar pada masyarakat. Dalam kunjungan tersebut juga saling bertukar pikiran terkait kompetisi perusahaan yang saat ini semakin ketat.

Sri Warsiti mengatakan, Kedaulatan Rakyat bisa bertahan dan tetap eksis hingga di usia 79 tahun. Hal ini dikarenakan KR didirikan oleh para pendahulu dengan ruh perjuangan. Koran yang lahir 27 September 1945, hanya sekitar 40 hari setelah kemerdekaan RI tersebut mengemban misi memberikan kemanfaatan untuk masyarakat atau migunani tumrapping liyan. **(Sit)-f**

PERATURAN KPU SUKOHARJO
Tetapkan Pemasangan APK

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo nomor 877 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2024. Keputusan ini mengatur lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk pemasangan APK. Apabila ditemukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan.

Komisieron KPU Kabupaten Sukoharjo, Murwedhy Tanomo mengatakan pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan. Lokasi yang tidak boleh dipasangi APK di antaranya tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, dan fasilitas tertentu milik pemerintah.

Lokasi jalan yang dilarang pemasangan APK meliputi Jalan Veteran Sukoharjo dari proliman sampai dengan alun-alun. Jalan Raya Ir Soekarno Solo Baru dari patung Soekarno sampai dengan Pos Polisi Bacem. Jalan protokol dari patung jamu sampai dengan Tugu Adipura Proliman. Sejumlah taman juga dilarang, seperti Taman Bacem, Taman Tugu Kartasura, Taman Timur Terminal Sukoharjo, Taman Wajah Kota, Taman Patung Jamu.

Kemudian Taman Tugu Adipura, Taman Nguter, Taman Kompleks Perum Korpri, Taman Jalan Rajawali, Taman Wijayakusuma, Taman Pakujoyo, Taman Jembatan Ngrukem, Taman Depan Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Taman Patung Kuda Solo Baru, Taman Patung Pandawa Solo Baru, Patung Ir Soekarno Solo Baru. APK juga dilarang dipasang di median jalan atau pulau jalan, yakni jalan pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang di atas jalan," jelas Nurwedhy. **(Mam)-f**

DI KABUPATEN TEGAL
6 Kecamatan Kekeringan

SLAWI (KR) - Kemarau panjang menimbulkan dampak kekeringan melanda 6 wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal. Warga berharap segera turun bantuan dari pemerintah setempat. Wilayah kecamatan yang kekeringan itu meliputi, Kecamatan Jatinegara, Pangkah, Suradadi, Balapulung dan Kedungbanteng serta Warurejo.

Sentara itu kekeringan terparah terjadi di Desa Jatimulya Kecamatan Suradadi, di Desa Pener, Kecamatan Pangkah dan Desa Penusupan Kecamatan Kedungbanteng.

Menurut warga,8 untuk keperluan cuci tangan saja susah, harus menunggu bantuan air bersih. Menurut penduduk setempat, sumur warga banyak yang mengering. Jika masih ada airnya itupun warna airnya keruh. "Air sungai sudah mengering. Warga yang biasanya mencari air di sungai terpaksa harus mengeruk pasir agar keluar airnya," ujar Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas, Kabupaten Tegal, Ade Basari, Rabu (25/9).

Menurut Ade, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Tegal, langsung menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah itu, namun jumlahnya terbatas. Untuk penyaluran air bersih di Kecamatan Suradadi ada dua desa yakni, di Desa Harjasari dan Desa Jatimulya. Di dua desa itu, disalurkan sebanyak 5 tanki air bersih. "Bantuan akan disalurkan serelah ada permintaan resmi dari desa setempat. Bagi desa yang tidak mengajukan bantuan ya kami tidak menyalurkan karena dianggap tidak ada kekeringan," ungkap Ade.

Ade menambahkan, penyaluran air bersih di Kecamatan Jatinegara hanya satu desa yakni Desa Dukuhbangsa sebanyak 3 tanki. Kemudian di Kecamatan Balapulung juga satu desa yakni di Desa Harjawinangun sebanyak 3 tanki. **(Ryd)-f**

KETUA DPRD PURBALINGGA 2024-2029

Bambang Irawan Masih Berpeluang

PURBALINGGA (KR) - Ketua DPC PDI Perjuangan Purbalingga, Bambang Irawan berpeluang kembali menduduki jabatan ketua DPRD, menyusul terbitnya Surat DPP PDIP Nomor 6891/IN/DPP/IX/2024 tertanggal 25 September 2024.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto itu mengesahkan dan merekomendasikan Bambang Irawan menjadi Pimpinan DPRD Purbalingga periode 2024-2029 dari PDIP.

Selanjutnya, DPC PDIP mengirimkan surat bernomor 321/EX/DPC-03/IX/202 kepada Ketua Sementara DPRD Purbalingga perihal Rekomendasi Pengajuan Nama Ketua DPRD Purbalingga. "Surat itu berisi usulan dan rekomendasi Bambang Irawan sebagai Ketua DPRD Purbalingga 2024-2029," kata Sekretaris DPC PDIP Purbalingga, Karseno, Jumat (27/9).

Karseno menambahkan, pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan,

pimpinan DPRD terdiri satu orang ketua dan tiga wakil ketua untuk DPRD yang beranggotakan sampai dengan 50 orang. Pada Pemilu 2024, PDIP menjadi pemenang dengan raihan 14 kursi DPRD Purbalingga, sehingga berhak atas kursi Ketua DPRD. Pada ayat (2) dinyatakan Pimpinan DPR berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.

Menanggapi penugasan dari DPP PDIP untuk kembali menduduki jabatan Ketua DPRD Purbalingga, Bambang Irawan mengatakan siap untuk menjalankan penugasan partai. "Saya siap menjalankan amanat dan tugas dari DPP PDIP. "Mohon doa restu dan dukungan semua pihak," tuturnya. Bambang Irawan yang juga Ketua DPC PDIP Purbalingga sebelumnya juga menjabat Ketua DPRD



KR-Toto Rusmanto

Bambang Irawan

Purbalingga periode 2019-2024. Pada Pemilu 2024.

Terpisah, Sekretaris DPRD Purbalingga Edy Suryono menyebutkan DPRD Purbalingga telah melaksanakan rapat paripurna dengan agenda mengumumkan dan mengusulkan Pimpinan DPRD Purbalingga periode 2024-2029, Jumat (27/9).Empat nama pimpinan DPRD Purbalingga yang diusulkan terdiri Bambang Irawan dari PDIP sebagai ketua, Aman Wali-

yuddin dari PKB (wakil ketua), Aries Widiarso dari PKS (wakil ketua), dan Tenny Juliawati dari Partai Golkar (wakil ketua). Selanjutnya, penetapan usulan pimpinan DPRD tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Purbalingga untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Penetapan. Setelah itu, dilaksanakan pelantikan Pimpinan DPRD Purbalingga," ungkap Edy Suryono. **(Rus)-f**

PEMKAB SUKOHARJO SALURKAN BANTUAN AIR

6.065 Jiwa Terdampak Kekeringan

SUKOHARJO (KR) - Total ada 1.552 kepala keluarga (KK) atau 6.065 jiwa terdampak di Kabupaten Sukoharjo kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau ini. "Bantuan air bersih telah dikirim ke warga, total 255 tangki atau 1.361.000 liter," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo, Ariyanto Mulyatmojo, Kamis (26/9).

Menurutnya, berdasarkan data BPBD Sukoharjo yang masuk per Selasa (24/9) diketahui wilayah terdampak kekeringan akibat cuaca panas musim kemarau sekarang berada di 3 kecamatan, 10 desa, 17 dukuh, 2 sekolah dasar (SD) dan 1 pondok pesantren (ponpes).

Semua yang terdampak kekeringan berupa kekurangan air bersih tersebut telah ditangani Pemkab Sukoharjo.

"Dari data BPBD Sukoharjo diketahui ada 1.552 KK atau 6.065 jiwa warga terdampak kekeringan. Pemkab Sukoharjo bersama pihak terkait sudah mengirimkan bantuan air bersih, total 255 truk tangki atau 1.361.000 liter air," tandas Ariyanto.

Tiga kecamatan terdampak kekeringan meliputi Tawangsari, Weru dan Bulu. Bantuan air bersih sudah dikirim di tiga kecamatan tersebut, dengan jumlah berbeda. Tertinggi di Kecamatan Weru sebanyak 102 tanki, Kecamatan

Bulu 83 tanki, dan Kecamatan Tawangsari 70 tanki. Semua air bersih yang dikirim sudah diserahkan dan digunakan warga khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti memasak dan minum.

BPBD Sukoharjo memastikan semua warga terdampak kekeringan sudah mendapat bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bantuan air bersih masih terus dikirim setiap hari oleh Pemkab Sukoharjo secara bergantian sesuai jadwal.

"Jumlah bantuan air bersih bisa berubah setiap hari ada penambahan. Sebab masih ada pengiriman bantuan air bersih dari Pem-

kab Sukoharjo ke warga terdampak kekeringan. Seperti untuk data 25 dan 26 September 2024 ini masih kami tunggu totalnya. Nanti kami informasikan lagi," ungkap Ariyanto.

Camat Weru Pandiyanto mengatakan, ada empat desa di wilayah Kecamatan Weru terdampak kekeringan akibat cuaca panas musim kemarau. Kekeringan membuat warga kekurangan air bersih. Kondisi sumur warga selama musim kemarau mengalami penurunan drastis debit air bersih. "Warga terdampak kekeringan sudah mendapat bantuan air bersih dari Pemkab Sukoharjo," ujarnya. **(Mam)-f**

PENJABAT BUPATI BANYUMAS MULAI BERTUGAS

Fokus Berantas Kemiskinan dan Stunting

BANYUMAS (KR) - Hari pertama kerja Penjabat (Pj) Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, Senin (23/9), memimpin apel pagi di halaman Pendapa Sipanji Purwokerto Banyumas. Apel pertama tersebut dihadiri Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah, DPRD, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Dalam kesempatan tersebut, Iwanuddin menekankan pentingnya kerja sama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Setelah apel, Iwanuddin langsung memimpin rapat koordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas langkah-langkah ke depan.

Ia menyatakan berkomitmen untuk fokus pada isu-isu penting seperti pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan peningkatan minat investor. "Saya akan bekerja dengan niat yang tulus dan menetapkan target yang jelas," ujarnya.

Iwanuddin juga menekankan pentingnya pelayanan publik. Ia mengajak seluruh pegawai untuk

bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan kepada masyarakat. "Masyarakat membutuhkan kita untuk usaha yang luar biasa," tegasnya.

Ia ingin membuka ruang diskusi dan meminta dukungan dari ASN untuk bersama-sama mengatasi masalah di Banyumas. "Saya berharap setiap orang dapat saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas," ungkapnya.

Iwanuddin Iskandar SH MHum dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Banyumas menggantikan Hanung Cahyo Saputro, Kamis (19/9) lalu. Pelantikan dilakukan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana di Wisma Perdamaian Semarang. Iwanuddin sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebelumnya menjadi Pj Bupati Brebes.

Dalam pelantikan, Nana Sudjana menyoroti tingginya angka pengangguran di Banyumas yang masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, ia meminta perhatian khusus Iwanud-



KR-Istimewa

Pj Bupati Banyumas Iwanudin saat memimpin apel hari pertama kerja.

din untuk menangani masalah pengangguran. Selain itu, Pj Gubernur Jateng juga minta Iwanuddin memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024. Kebetulan, Pilkada di Banyumas dan Brebes hanya akan diikuti calon tunggal atau melawan kotak kosong.

"Meskipun hanya ada calon tunggal, potensi konflik masih bisa terjadi. Kita harus tetap waspada," ungkap Nana Sudjana. Ia juga mengingatkan bahwa Makassar saat melaksanakan Pilkada 2018 dengan calon tunggal, ternyata dimenangkan oleh kotak kosong," kata Nana Sydjana. **(Dri)-f**

PENERTIBAN DI KARANGANYAR

Gambar Bukan Paslon Diturunkan

KARANGANYAR (KR) - Aparat gabungan menu-runkan alat peraga sosialisasi (APS) politik di wilayah Kecamatan Karanganyar, Jumat (27/9). Sasarannya spanduk, poster dan MMT bergambar nonpaslon bupati wakil bupati Kabupa-

ten Karanganyar.

Gambar-gambar tersebut dianggap membingungkan masyarakat menjelang Pilkada 2024.

Aparat Satpol PP, Bawaslu, TNI dan Polri menyisir ruas jalan wilayah Karanganyar Kota di Jalan



KR-Abdul Alim

Satpol PP Karanganyar melepas gambar non-paslon kepala daerah.

Kapten Mulyadi sampai Jalan Lawu Karanganyar. Untuk mempercepat penyisiran, aparat dibagi dua tim. Mereka menurunkan poster, spanduk dan MMT selain bergambar Rober Christanto-Adhe Eliana dan Ilyas Akbar Almadani-Tri Haryadi. Gambar dua pasangan calon bupati wakil bupati itu tidak diturunkan. Aparat hanya melepas gambar-gambar tokoh politik yang tak lolos penjarangan bakal calon bupati dan wakil bupati oleh parpol.

Kepala Satpol PP Karanganyar, Bakdo Harsono mengatakan pelepasan alat peraga sosialisasi (APS) politik itu merupakan kesepakatan bersama Bawaslu dan stakeholder. Sebelum masuk masa kam-

panye Pilkada, pelepasannya menjadi tanggungjawab Satpol PP. Sasaran penertiban di wilayah Karanganyar Kota.

"Ini nanti ditertibkan menyeluruh secara bertahap. Di kota dulu. Penertiban ini juga untuk menegaskan Perbup Nomor 43 Tahun 2023," jelas Bakdo Harsono.

Ia mengatakan, gambar-gambar terpasang di ruang publik itu selain merusak pemandangan kota juga dianggap membingungkan pemilih. KPU hanya menetapkan dua pasang calon bupati wakil bupati Karanganyar, yakni Rober Adhe bernomor urut dua dan Ilyas-Tri Haryadi bernomor urut 1.

Ratusan poster yang di-

lepas itu kemudian diangkut truk Satpol PP. Bakdo mengatakan alat peraga itu disimpan dulu. Jika semua sudah terkumpul akan dimusnahkan bersama hasil penertiban oleh Bawaslu.

Terpisah, Komisieron Bawaslu Karanganyar Ikhsan Nur Isfiyanto mengapresiasi Satpol PP yang langsung bertindak usai rapat koordinasi. Ia berharap dua paslon mematuhi aturan kampanye dengan tidak memasang alat peraga sosialisasi politik secara sembarangan. "Satpol PP menegaskan Perbup Karanganyar terkait larangan pemasangan APS di tempat tidak seharusnya, seperti di pohon dan jalan-jalan terlarang pemasangan," tandasnya. **(Lim)-f**